

**RANCANGAN AKHIR  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**

**DINAS PARIWISATA KOTA PANGKALPINANG  
TAHUN 2018 - 2023**



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG  
DINAS PARIWISATA  
KOTA PANGKALPINANG**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan KaruniaNya sehingga penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2018 - 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategik ini merupakan salah satu bagian dari dokumen perencanaan pembangunan di Kota Pangkalpinang dan merupakan upaya untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Kota Pangkalpinang. Diharapkan melalui Rancangan Akhir Perubahan Renstra ini arahan dan strategi pembangunan kepariwisataan di Kota Pangkalpinang dapat dilaksanakan secara sistematis dan menuju kepada pencapaian visi dan misi Kota Pangkalpinang.

Untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renstra ini kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan dari semua pihak termasuk dari pemangku kepentingan (stakeholder) sangat diharapkan. Semoga Rancangan Akhir Perubahan Renstra ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja sumber daya manusia birokrasi di OPD Dinas Pariwisata dan bermanfaat sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang. Semoga Rancangan Akhir Perubahan Renstra ini bermanfaat bagi kemajuan Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, Juli 2021

Kepala Dinas Pariwisata  
Kota Pangkalpinang,



Agung Yudi Utama, SE, M.TP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196911071996031003

## DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-5
1.3. Maksud dan Tujuan	I-9
1.4. Sistematika Penulisan	I-9
<b>BAB II    GAMBARAN PELAYANAN</b>	
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-6
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-8
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II-14
<b>BAB III   ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	III-3
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	III-5
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	III-11
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-13
<b>BAB IV   TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pariwisata	IV-1
4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata	IV-1
<b>BAB V    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1 Strategi	V-1
5.2 Arah Kebijakan	V-1
<b>BAB VI   RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
6.1 Program dan Kegiatan sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2016	VI-1
6.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan setelah Pemutakhiran Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No. 050 Tahun 2020	VI-3
<b>BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas	VII-2
<b>BAB VIII   PENUTUP</b>	VIII-1

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan sektor pariwisata mempunyai arti penting dan peranan strategis karena memberikan kontribusi bagi kemajuan pembangunan dan penerimaan keuangan daerah. Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini berkembang pesat menjadi pusat seluruh kegiatan wilayah termasuk berkembangnya kegiatan kepariwisataan di Kota Pangkalpinang. Pembangunan Kepariwisata sudah saatnya dilaksanakan secara terencana, terstruktur dan berkelanjutan. Pembangunan sektor kepariwisataan memiliki keunikan karena sifatnya yang interdependensi karena pembangunannya harus melibatkan berbagai sektor dan bersinergi dengan pembangunan sektor lainnya.

Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara esensial telah merubah format klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari tiga urusan, yakni urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota, sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Kegiatan ekonomi masyarakat Kota Pangkalpinang yang menonjol dan dominan pada sektor perdagangan, industri dan jasa sangat memungkinkan untuk disinergikan dengan pengembangan kepariwisataan. Aksesibilitas menuju Kota Pangkalpinang saat ini tergolong lancar hanya membutuhkan waktu sekitar 50 menit perjalanan dari Jakarta dengan 5 flight penerbangan PP, sedangkan akses lain dengan rute tujuan Palembang, Batam dan Tanjung Pandan relatif singkat. Disamping itu Pangkalpinang juga memiliki pelabuhan laut Pangkalbalam yang disamping berfungsi sebagai pelabuhan barang juga



berfungsi sebagai pelabuhan penumpang. Kemudian aksesibilitas ke masing-masing destinasi pariwisata relatif mudah dan terjangkau dengan kualitas jalan dan transportasi yang memadai, fasilitas akomodasi pun relatif tersedia dan cukup memadai.

Berdasarkan gambaran potensi-potensi di atas dan melihat upaya pencapaian Visi Kota Pangkalpinang sebagai kota Senyum (Sejahtera, Nyaman, Unggul, Makmur) serta salah satu sektor yang akan dikembangkan adalah investasi sektor kepariwisataan, maka terdapat beberapa isu aktual yang dianggap sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan yaitu belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan bidang kepariwisataan, kemudian pembangunan bidang kepariwisataan masih kurang melibatkan stakeholders baik pemerintah selaku pengambil kebijakan, pelaku industri pariwisata, pelaku budaya dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya, isu selanjutnya adalah kurangnya keterpaduan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan, minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kepariwisataan, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang menangani kepariwisataan. Ancaman perusakan destinasi pariwisata oleh oknum anggota masyarakat yang tidak bertanggungjawab, serta pembangunan kepariwisataan belum dianggap sebagai sektor andalan.

Pada tahun 2019 telah ditetapkan RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang periode 2018-2023. Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah, dimana Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata. Sedangkan

urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga sudah diampu oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang.

Kemudian pada tahun 2019 telah ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, sehingga terjadilah perubahan pada RPJMN dan skala prioritas nasional terhadap pembangunan, salah satunya terhadap sektor pariwisata sehingga berimplementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi di daerah.

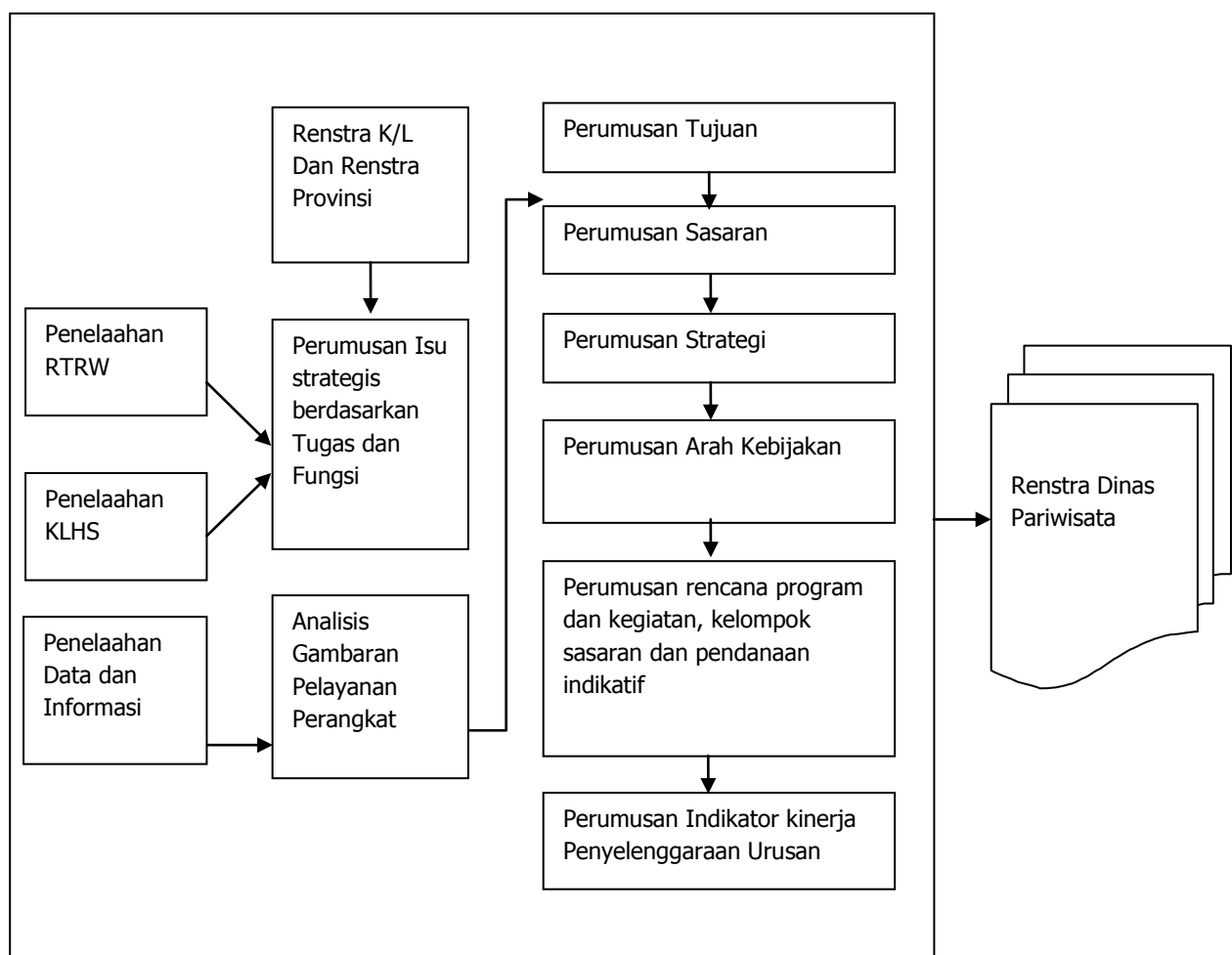
Pada awal tahun 2020 terjadinya pandemi covid-19 yang bukan hanya terjadi di daerah maupun di pusat, tetapi juga melanda seluruh dunia sehingga menjadi kejadian luar biasa yang mengakibatkan berubahnya prioritas pendanaan pemerintah baik di pusat maupun daerah, dimana anggaran lebih ditujukan untuk penanganan pandemi tersebut.

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) dan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan. Disusul dengan ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga adanya perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

Untuk itu perlulah disusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk mendukung capaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rancangan Akhir Perubahan Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Pariwisata, Revisi Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Tahapan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut.



**Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pariwisata**

Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2020-2023. Selain itu Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Pariwisata Kota Pangkalpinang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat dan Kab. Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 04 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025;
25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
28. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan Pilihan Pariwisata selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Pangkalpinang.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang tahun 2019-2023.

## **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang.

## **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, telaahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

## **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang.

## **Bab V Strategi dan Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Pariwisata.

## **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

## **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2020-2023.

## **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang.



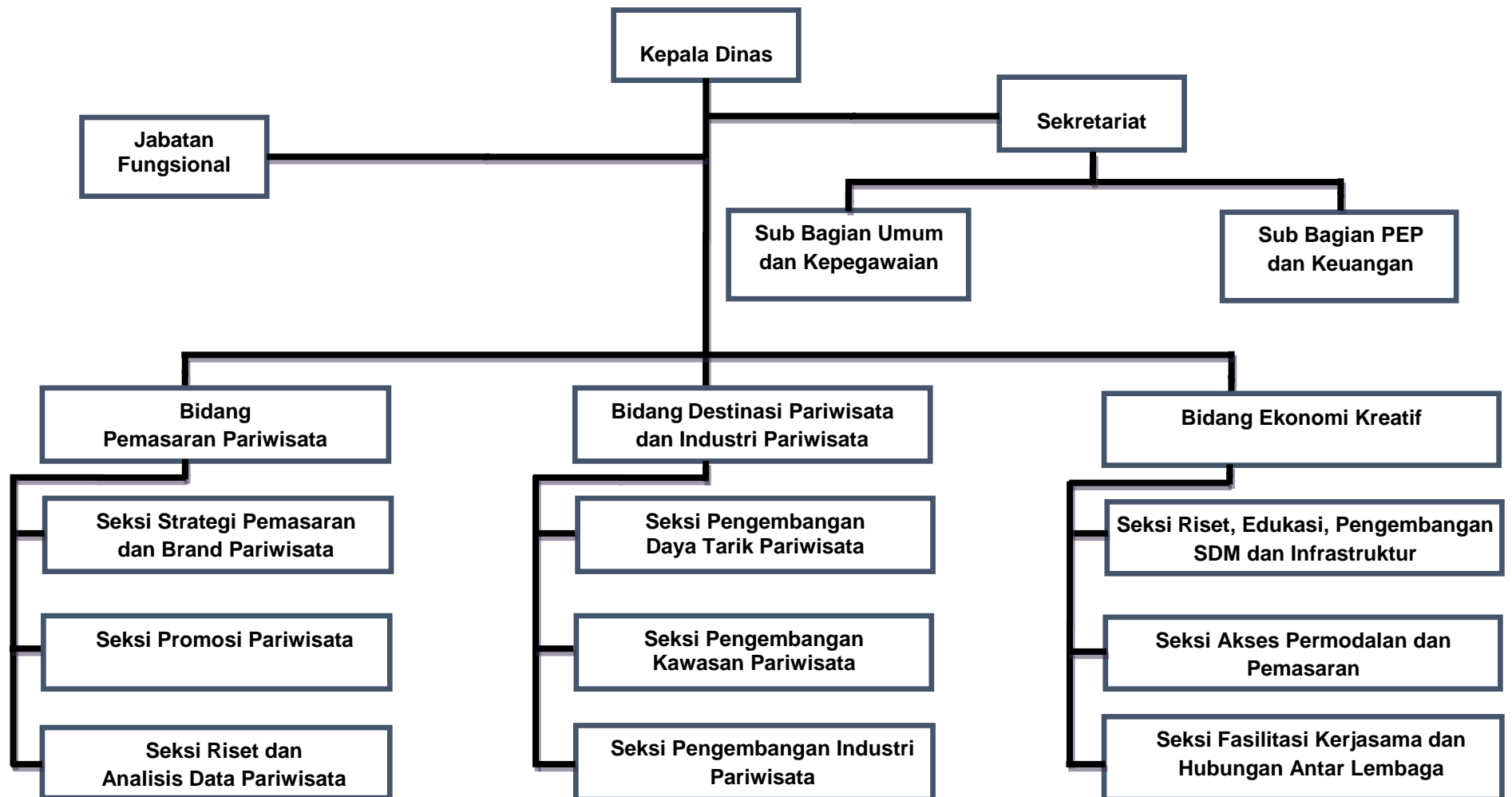
## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian PEP dan Keuangan
- c. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
  1. Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata;
  2. Seksi Promosi Pariwisata; dan
  3. Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata;
- d. Bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata, terdiri dari :
  1. Seksi Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
  2. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
  3. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata;
- e. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
  1. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur;
  2. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran; dan
  3. Seksi Fasilitasi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga;



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata

### 2.4.2 Uraian Tugas

Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pariwisata;
- b. penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Pariwisata;
- d. penetapan rencana kerja dinas Pariwisata menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pariwisata;
- f. pelaksanaan perencanaan bidang Pariwisata;
- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan urusan Pariwisata di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana ; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :

**a. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Pariwisata;
- 2) penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Pariwisata;
- 3) penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Pariwisata;
- 4) penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Pariwisata; dan ;
- 5) pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata**

Bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pariwisata dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik destinasi pariwisata dan pengembangan industri pariwisata Pemerintah Kota;
- 2) menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata Pemerintah Kota;

- 3) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata Kota;
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata Kota;
- 5) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata; dan;
- 6) melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**c. Bidang Pemasaran Pariwisata**

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemasaran Pariwisata kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang serta pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemasaran Pariwisata Kota;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemasaran Pariwisata Kota;
- 3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang Pemasaran Pariwisata Kota;
- 4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemasaran Pariwisata Kota;
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemasaran Pariwisata Kota; dan;
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



#### **d. Bidang Ekonomi Kreatif**

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang Ekonomi Kreatif.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tata kelola peningkatan kebijakan teknis bidang Ekonomi Kreatif di lingkungan pemerintah daerah;
- 2) pelaksanaan pengembangan bidang Ekonomi Kreatif;
- 3) pelaksanaan standar kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif skala kota;
- 4) pelaksanaan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam, manusia dan budaya dalam pengembangan Ekonomi Kreatif Pemerintah di Kota;
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu pengembangan Ekonomi Kreatif lingkup Pemerintah Kota;
- 6) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan peningkatan pengembangan Ekonomi Kreatif Kota; dan
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Pegawai dilingkungan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang terhitung tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 63 orang, terdiri dari 26 PNS (7 laki-laki dan 19 perempuan) dan 37 non PNS (21 laki-laki dan 16 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, jumlah PNS yang berpendidikan S2 sejumlah 2 orang, S1 sejumlah 21 orang dan D3 sejumlah 3 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**di Dinas Pariwisata Tahun 2020**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Tidak Tamat			2	2	
2	SD Sederajat			4	3	
3	SMP Sederajat			2	2	
3	SMA Sederajat			5	10	
4	D3	2	1	-	3	
5	S1	5	16	2	2	
6	S2	-	2	-	-	
7	S3	-	-	-	-	

Dilihat dari golongannya, pada tahun 2020 pegawai PNS Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang terdiri dari golongan IV sejumlah 2 orang dan golongan III sejumlah 24 orang, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**di Dinas Pariwisata Tahun 2020**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	0	0	0
2	Golongan III	7	17	24
3	Golongan IV	0	2	2

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pariwisata meliputi Tanah, Aset Peralatan dan Mesin, Aset Gedung dan Bangunan, Aset Jalan dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya, dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi**  
**di Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2020 (Semester II)**

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah	2.767.860.000,00	Baik
2.	Peralatan dan mesin	1.822.681.073,00	Baik
3.	Gedung dan bangunan	12.738.220.024,00	Baik
4.	Jalan dan jaringan	702.969.350,00	Baik
5.	Asset tetap lainnya	54.900.000,00	Baik

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang meliputi Pemerintahan **URUSAN PARIWISATA**, melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan kepariwisataan melalui pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan industri pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif.

Tujuan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 untuk Urusan Pariwisata adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah dengan target indikator tujuan PDRB perkapita.

Sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 untuk Urusan Pariwisata adalah meningkatnya penggalian, pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah dengan target indikator sasaran PAD sektor pariwisata.

Pada tahun 2013-2018 Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang melaksanakan beberapa pelayanan yang berkaitan dengan urusan kepariwisataan antara lain:

1. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,5 persen pertahun, di hitung berdasarkan jumlah wisatawan yang menginap;
2. Berkembangnya jumlah usaha jasa pariwisata yang berkualitas di Kota Pangkalpinang sebagai penunjang ekonomi kreatif;
3. Bertambahnya jumlah destinasi wisata di Kota Pangkalpinang.

Kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Rasio Capaian Pada Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kunjungan wisatawan			200.000 org	205.000 org	210. 000 org	231. 000 org	198.008 org	214.141 org	228.473 org	315.888 org	99%	104,46%	108,80%	136,74%
2	Jumlah wisatawan yang menginap			200.000 org	205.000 org	210. 000 org	231. 000 org	198.008 org	214.141 org	228.473 org	315.888 org	99%	104,46%	108,80%	136,74%
3	Rata-rata lama tinggal wisatawan			2-3 hari	2-3 hari	2-3 hari	2-3 hari	1,5 hari	1,5 hari	1,5 hari	1,5 hari	75%	75%	75%	75%
4	Jumlah jasa usaha pariwisata yang berkualitas			647 usaha	440 usaha	500 usaha	500 usaha	707 usaha	515 usaha	573 usaha	500 usaha	109,27%	117,05%	114,60%	100%
5	Jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi penunjang MICE			41 usaha	46 usaha	49 usaha	49 usaha	46 usaha	46 usaha	49 usaha	49 usaha	112,20%	100%	100%	100%
6	Jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi penunjang MICE yang berkualitas			8 usaha	10 usaha	27 usaha	27 usaha	25 usaha	25 usaha	27 usaha	27 usaha	312,50%	270%	100%	100%
7	Jumlah kampung wisata			1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah destinasi wisata			40 tempat	45 tempat	45 tempat	45 tempat	40 tempat	45 tempat	45 tempat	45 tempat	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah pemuda yang berprestasi			247 orang	427 orang	577 orang	577 orang	247 orang	427 orang	577 orang	577 orang	100%	100%	100%	100%

## Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2018-2023

10	Jumlah prestasi olahraga di tingkat kota, provinsi dan nasional			38 cabang	38 cabang	38 cabang	38 cabang	38 cabang	38 cabang	38 cabang	38 cabang	100%	100%	100%	100%
11	Indeks Kepuasan Masyarakat			50%	65%	70%	70%	30%	50%	65%	70%	60%	77%	92,85%	100%



Adapun Kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			10%	10%	10%	10%	10%	-50,05%	-82,07%	0	0	0	-5,01%	-8,21%	0	0	0
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/ kota			10%	10%	10%	10%	10%	39,50%	-57,57%	0	0	0	3,95%	-5,76%	0	0	0
3	Tingkat hunian akomodasi			5%	5%	5%	5%	5%	47,04%	29,95%	0	0	0	9,41%	5,99%	0	0	0
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku			3,47%	5%	5,2%	5,35%	5,5%	3,88%	4,10%	0	0	0	1,18%	0,82%	0	0	0
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD			2,1%	2,1%	10%	10%	10%	2,13%	9,86%	0	0	0	101,43 %	469,5%	0	0	0

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pariwisata**  
**Kota Pangkalpinang**

Program	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
Program pelayanan administrasi perkantoran	715.388.015	464.738.500	591.376.800	801.806.800	491.453.450	667.164.033	404.770.188	516.221.258	730.626.590	476.975.452	93,25	87,09	87,29	91,12	97,05	612.952.713	559.151.504,2
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	187.538.000	122.331.500	167.331.500	321.135.500	96.620.800	159.866.193	98.973.337	142.984.407	298.666.957	75.902.300	85,24	80,90	85,45	93,00	78,56	178.991.460	155.278.638,8
Program peningkatan disiplin aparatur	4.200.000	-	20.700.000	40.040.000	-	4.200.000	-	20.553.800	37.100.000	-	100	-	99,29	92,66	-	17.923.333,33	17.008.966,67
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	16.000.000	-	-	-	-	53,33	-	10.000.000	2.783.333,33
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.000.000	4.000.000	8.000.000	29.099.720	12.180.000	8.000.000	4.000.000	8.000.000	27.944.560	12.180.000	100	100	100	96,03	100	12.255.944	12.024.912
Program pengembangan nilai budaya	328.000.000	-	-	-	-	326.991.000	-	-	-	-	99,69	-	-	-	-	142.500.000	141.488.000
Program pengelolaan kekayaan budaya	280.190.500	-	-	-	-	279.960.500	-	-	-	-	99,91	-	-	-	-	129.627.583,33	116.974.820,83
Program pengelolaan keragaman budaya	541.453.708	-	-	-	-	516.124.708	-	-	-	-	95,32	-	-	-	-	445.809.784,67	406.879.701,33
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	176.047.799	-	-	-	-	176.047.799	-	-	-	-	100	-	-	-	-	93.347.633,17	91.640.749,83
Program peningkatan peran serta kepemudaan	729.427.800	572.680.000	677.720.000	939.629.720	-	715.631.200	554.563.000	672.662.700	916.423.840	-	98,10	96,83	99,25	97,53	-	753.076.586,67	722.775.206,67
Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	-	-	50.000.000	-	-	-	-	48.500.000	-	-	-	-	97	-	-	28.333.333,33	26.524.666,67
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	1.576.924.000	739.662.600	1.072.272.500	2.147.193.100	-	1.496.728.400	686.892.198	1.050.002.016	2.077.856.722	-	94,91	92,86	97,92	96,53	-	1.401.069.783,33	1.312.603.756
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	243.000.000	75.350.000
Program pengembangan pemasaran pariwisata	1.057.918.733	319.735.000	321.719.000	979.498.500	-	1.054.553.115	301.732.430	308.069.312	963.979.612	-	99,68	94,36	95,75	98,42	-	754.016.038,83	727.750.988,17

## Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2018-2023

Program pengembangan destinasi pariwisata	517.783.000	274.365.700	2.010.686.700	3.194.204.660	-	508.864.050	259.232.301	1.467.495.034	3.057.070.534	-	98,27	94,48	72,98	95,71	-	1.226.386.176,67	1.083.588.678,17
Program pengembangan kemitraan	186.564.000	9.250.000	77.310.000	383.600.000	-	186.494.000	9.250.000	75.685.000	372.289.500	-	99,96	100	97,89	97,05	-	216.989.000	211.199.716,67
Program peningkatan kepariwisataan	-	-	-	-	4,034,884,984	-	-	-	-	2,337,824,988.59	-	-	-	-	57,94	4,034,884,984	2,337,824,988.59
Program peningkatan kepemudaan dan olahraga	-	-	-	-	303,237,600.00	-	-	-	-	303,237,600.00	-	-	-	-	100	303,237,600.00	303,237,600.00

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yaitu terbatas dalam hal pendanaan.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.4.1 Kekuatan**

Kekuatan adalah situasi yang mengambil keuntungan dari peluang yang ada dan membantu mencapai tujuan dari dalam (internal). Kekuatan Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang untuk urusan pariwisata yaitu sebagai berikut:

- 1) Banyaknya pelaksanaan event pariwisata;
- 2) Dukungan teknologi informasi sebagai sarana informasi wisata;
- 3) Daya dukung iklim, suasana dan banyaknya Obyek Daya Tarik Wisata yang menarik minat wisatawan;
- 4) Keragaman budaya daerah Kota Pangkalpinang;

### **2.4.2 Kelemahan**

Kelemahan adalah situasi yang dapat menghambat dalam mencapai tujuan dan berasal dari dalam (internal). Kelemahan Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang untuk urusan pariwisata yaitu sebagai berikut:

- 1) Kurangnya penguasaan teknologi;
- 2) Kurangnya inovasi dari daya manusia pariwisata yang ada;
- 3) Lemahnya disiplin aparatur.

### **2.4.3 Peluang**

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran serta stakeholder dalam menciptakan produk-produk unggulan di setiap destinasi wisata;
2. Banyak dan tingginya minat investor untuk berinvestasi dalam pembangunan dan pengembangan sarana wisata;
3. Banyaknya industri/jasa pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan;
4. Banyaknya event pariwisata baik dalam maupun luar daerah.

#### **2.4.4 Tantangan/ Ancaman**

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang untuk urusan pariwisata yaitu sebagai berikut:

- 1) Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan perjalanan yang dilakukan ke Kota Pangkalpinang cenderung untuk perjalanan bisnis/ pekerjaan;
- 2) Tingkat hunian akomodasi belum maksimal dikarenakan kegiatan di hotel hanya sebatas rapat/pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi/ pemerintah;
- 3) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam penanganan pandemi covid-19.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pembangunan kepariwisataan merupakan satu kesatuan dalam proses pembangunan daerah. Dengan dijadikannya Kota Pangkalpinang sebagai Ibukota Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan jumlah wisatawan yang datang ke Pangkalpinang semakin meningkat setiap tahunnya. Kunjungan wisatawan merupakan salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan PDRB di sektor pariwisata.

Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi pariwisata dan tantangan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan datang ke Pangkalpinang.

Sehingga dalam menjalankan tujuan tersebut Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, adapun gambaran permasalahan yang dapat diidentifikasi pada Urusan Pariwisata, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal
- b. Belum adanya riset pasar wisatawan
- c. Strategi komunikasi pemasaran belum optimal
- d. Kegiatan promosi masih berjalan parsial
- e. Belum optimalnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder
- f. Kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal
- g. Belum dilakukannya riset untuk pengembangan ekonomi kreatif
- h. Pengetahuan dan keterampilan pelaku ekonomi kreatif perlu ditingkatkan
- i. Skema insentif bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual belum terbangun
- j. Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Hak Kepada Kekayaan Intelektual atas karyanya masih terbatas

Pembentukan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas penguatan terhadap salah satu unggulan daerah yaitu pariwisata di Pemerintahan Kota Pangkalpinang pada khususnya, dan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya.

Potensi pengembangan kepariwisataan pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

- a. Banyaknya pelaksanaan event pariwisata;
- b. Dukungan teknologi informasi sebagai sarana informasi wisata;
- c. Daya dukung iklim, suasana dan banyaknya Obyek Daya Tarik Wisata yang menarik minat wisatawan;
- d. Keragaman budaya daerah Kota Pangkalpinang;
- e. Kekayaan alam dan potensi pariwisata;
- f. Meningkatnya peran serta stakeholder dalam menciptakan produk-produk unggulan di setiap destinasi wisata;
- g. Banyak dan tingginya minat investor untuk berinvestasi dalam pembangunan dan pengembangan sarana wisata;
- h. Banyaknya industri/jasa pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan;

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

***MEWUJUDKAN PANGKALPINANG SEBAGAI KOTA SENYUM  
(SEJAHTERA, NYAMAN, UNGGUL, MAKMUR)***

Adapun penjabaran Visi Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut :

1. Sejahtera : aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan)
2. Nyaman : segar; sehat; kenyamanan (rasa nyaman)
3. Unggul : lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet dan sebagainya) daripada yang lain-lain; utama
4. Makmur : banyak hasil; serba kecukupan; tidak kekurangan

Berdasarkan visi tersebut dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang melaksanakan misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu :

Misi ke-1 yaitu : Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan

Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah

Indikator Tujuan : PDRB perkapita

Sasaran : Meningkatnya penggalan, pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah

Indikator Sasaran : PAD sektor pariwisata

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.



**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pariwisata**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah**  
**dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi ke-1 Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan</p> <p>Tujuan misi ke-1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah</p> <p>Sasaran Meningkatnya penggalian, pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah</p>	<p>1) Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal</p> <p>2) Belum adanya riset pasar wisatawan</p> <p>3) Strategi komunikasi pemasaran belum optimal</p> <p>4) Kegiatan promosi masih berjalan parsial</p> <p>5) Belum optimalnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder</p> <p>6) Kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal</p> <p>7) Belum dilakukannya riset untuk pengembangan ekonomi kreatif</p> <p>8) Pengetahuan dan keterampilan pelaku ekonomi kreatif perlu ditingkatkan</p> <p>9) Skema insentif bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual belum terbangun</p> <p>10) Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Hak Kepada Kekayaan Intelektual atas karyanya masih terbatas</p>	<p>1) Kurangnya penguasaan teknologi;</p> <p>2) Kurangnya inovasi dari daya manusia pariwisata yang ada;</p> <p>3) Lemahnya disiplin aparatur;</p> <p>4) Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mengalami penurunan yang sangat signifikan;</p> <p>5) Tingkat hunian akomodasi belum maksimal;</p> <p>6) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam penanganan pandemi covid-19.</p>	<p>1) Banyaknya pelaksanaan event pariwisata;</p> <p>2) Dukungan teknologi informasi sebagai sarana informasi wisata;</p> <p>3) Daya dukung iklim, suasana dan banyaknya Obyek Daya Tarik Wisata yang menarik minat wisatawan;</p> <p>4) Keragaman budaya daerah Kota Pangkalpinang;</p> <p>5) Kekayaan alam dan potensi pariwisata;</p> <p>6) Meningkatnya peran serta stakeholder dalam menciptakan produk-produk unggulan di setiap destinasi wisata;</p> <p>7) Banyak dan tingginya minat investor untuk berinvestasi dalam pembangunan dan pengembangan sarana wisata;</p> <p>8) Banyaknya industri/jasa pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan</p>

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra K/L**

Telaahan Renstra Kementerian atau Lembaga yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dan mempengaruhi terhadap penanganan permasalahan baik faktor-faktor yang bersifat menghambat maupun yang mendorong.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 3.3.1**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang**  
**berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kementerian Pariwisata Misi 1: Mengembangkan kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mendorong pembangunan daerah			
	T1. Peningkatan kontribusi ekonomi kepariwisataan Indonesia			
	S1. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional	Sasaran ini dalam dokumen renstra sebelumnya tidak dijadikan sasaran kinerja OPD	Sulitnya menentukan nilai perhitungan PDRB	Sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas dalam RPJMD 2018-2023
	S2. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja nasional	Sasaran ini dalam dokumen renstra sebelumnya tidak dijadikan sasaran kinerja OPD Belum terbangunnya data ketenagakerjaan sektor pariwisata yang terintegrasi, lengkap dan valid	Kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja di sektor pariwisata belum dijadikan indikator capaian kinerja OPD pada dokumen renstra Dinas Pariwisata	Sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas dalam RPJMD 2018-2023
	S3. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata	Sasaran ini dalam dokumen renstra sebelumnya tidak dijadikan sasaran kinerja OPD Belum terbangunnya data investasi pariwisata yang terintegrasi, lengkap dan valid	Investasi di sektor pariwisata belum dijadikan indikator capaian kinerja OPD Dinas Pariwisata pada dokumen renstra	Sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas dalam RPJMD 2018-2023

**Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2018-2023**

	S4. Meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan di Indonesia	data primer sulit diperoleh	Pengelolaan bandara ada di kewenangan propinsi	Sektor pariwisata menjadi prioritas dalam RPJMD 2018-2023
	S5. Meningkatnya kuantitas wisman ke Indonesia dan wisnus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya diversifikasi destinasi pariwisata di daerah</li> <li>Masih kurangnya aksesibilitas, amenities, acillary dan atraksi pariwisata di daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih lemahnya koordinasi dengan stakeholder pariwisata</li> <li>Terbatasnya anggaran dalam rangka pemasaran / promosi pariwisata</li> </ul>	Sektor pariwisata menjadi prioritas dalam RPJMD 2018-2023
T2. Peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia				
	S6. Meningkatnya citra kepariwisataan Indonesia	Masih kurangnya aksesibilitas, amenities, acillary dan atraksi pariwisata di daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih terbatasnya jumlah sarana prasarana dan fasilitas umum pendukung pariwisata</li> <li>Terbatasnya anggaran dalam upaya pengembangan destinasi pariwisata</li> <li>Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Pariwisata</li> </ul>	Sektor pariwisata menjadi prioritas dalam RPJMD 2018-2023
	S7. Terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya diversifikasi destinasi pariwisata di daerah</li> <li>Belum adanya bidang destinasi dalam struktur organisasi SKPD Budpar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih terbatasnya jumlah sarana prasarana dan fasilitas umum pendukung pariwisata</li> <li>Terbatasnya anggaran dalam upaya pengembangan destinasi pariwisata</li> <li>Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Pariwisata</li> </ul>	Sektor pariwisata menjadi prioritas dalam RPJMD 2018-2023
	S8. Terciptanya pemasaran dan promosi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pangsa pasar belum terbentuk sehingga promosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya anggaran dalam upaya pengembangan</li> </ul>	Sektor pariwisata menjadi prioritas dalam RPJMD 2018-2023

**Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2018-2023**

	yang berkualitas dan bertanggungjawab	belum dilakukan fokus pada pangsa pasar <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemasaran belum fokus pada upaya meningkatkan dampak pada peningkatan</li></ul>	destinasi pariwisata <ul style="list-style-type: none"><li>• Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Pariwisata</li></ul>	
--	---------------------------------------	---	--	--

### **3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bangka Belitung**

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Meningkatnya peran serta budaya lokal dalam mendukung sektor pariwisata.
2. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana di destinasi pariwisata.
3. Meningkatnya kualitas pemasaran pariwisata.
4. Meningkatnya jumlah sumberdaya pariwisata dan kelembagaan pariwisata yang berkualitas.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 3.3.2**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang**  
**berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor**  
**Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
	Sasaran 2 Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana di destinasi pariwisata	Terbatasnya pengembangan destinasi dan pemasaran serta peningkatan kemitraan kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"><li>- terbatasnya anggaran</li><li>- kurang optimalnya SDM pariwisata</li><li>- kurangnya pengembangan daya tarik wisata</li></ul>	Komitmen pemerintah dengan stakeholder dalam pengembangan kepariwisataan di Kota Pangkalpinang
	Sasaran 3 Meningkatnya kualitas pemasaran pariwisata.			
	Sasaran 4 Meningkatnya jumlah sumberdaya pariwisata dan kelembagaan pariwisata yang berkualitas			

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.



**Tabel 3.4.1**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan**  
**Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**  
**Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kawasan wisata sejarah, wisata budaya, wisata pesisir, wisata olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunnya kualitas obyek wisata</li> <li>• Menurunnya jumlah objek wisata</li> </ul>	Banyaknya aktifitas perekonomian seperti penambangan timah inkonvensional, yang dikelola oleh swasta maupun masyarakat yang tidak mengacu RTRW Kota menyebabkan banyak objek wisata pada destinasi pariwisata maupun cagar budaya yang ada di Pangkalpinang rusak.	Mendorong masyarakat untuk mencintai lingkungan. Perlu penegakan hukum lingkungan yang dikaitkan dengan RTRW Kota Pangkalpinang

### 3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian TPB/SDGs melalui program dan kegiatan yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi Dinas Pariwisata.

Secara tupoksi Dinas Pariwisata mengampu capaian TPB tujuan ke-8 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, dengan indikator dan target yang dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Kode Indikator	Target Indikator	Keterangan
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. (PDRB selaku kewenangan Kota	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

	Pangkalpinang)	
8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

Untuk target pada indikator jumlah wisatawan nusantara dan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dihitung berdasarkan jumlah tamu yang menginap di hotel.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, telaahan terhadap pencapaian visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang, kemudian telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta hasil kesepakatan antar pegawai Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, maka dapat ditarik isu-isu strategis untuk pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. Masih kurangnya peran serta dan kerjasama antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, swasta dan lainnya) dalam pengembangan pariwisata daerah;
3. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan dan daya tarik wisata;
4. Belum optimalnya pemasaran destinasi pariwisata;

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2020 adalah Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 adalah Meningkatkan potensi pariwisata dengan indikator PAD sektor pariwisata.

#### **4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tujuan Dinas Pariwisata dalam kurun waktu tahun 2018-2023 adalah Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata dengan indikator Jumlah kunjungan wisatawan dan rata-rata lama tinggal wisatawan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2018	Tahun				Akhir Renstra 2020
					2019		2020		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Meningkatkan potensi pariwisata		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1,64	2,1	2,13 (Rp. 19.132.510.820)	2,1	9,86 (Rp. 14.036.203.600)	9,86
	Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata	Tingkat kunjungan wisatawan	%	6,69	10	38,26	N/A	N/A	38,26
		Jumlah kunjungan wisatawan	orang	228.473	231.000	315.888	347.476	133.648	133.648

**Tabel 4.2**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Tahun			Akhir Renstra 2023
					2021	2022	2023	
<b>Meningkatkan potensi pariwisata</b>		<b>PAD sektor pariwisata</b>	Rp	14.036.203.600	15.439.823.960	16.983.806.356	18.682.186.991	18.682.186.991
	<b>Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata</b>	<b>Jumlah kunjungan wisatawan</b>	orang	133.648	147.012	161.713	177.884	177.884
		<b>Rata-rata lama tinggal wisatawan</b>	Hari	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang adalah Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan sarana pariwisata melalui pembangunan infrastruktur, SDM pariwisata, pengembangan promosi, kemitraan pariwisata.

#### **5.2. Arah Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengembangan Destinasi di setiap kecamatan
2. Peningkatan pengembangan kerjasama pemasaran dan kemitraan pariwisata

Arah kebijakan di atas menjadi prioritas oleh Dinas Pariwisata dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang**

<b>Visi RPJMD: Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera, Nyaman, Unggul, Makmur)</b>			
<b>Misi RPJMD yang terkait:</b>			
<b>Misi 1 : Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan potensi pariwisata		Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan sarana pariwisata melalui pembangunan infrastruktur, SDM pariwisata, pengembangan promosi, kemitraan pariwisata	1. Peningkatan Pengembangan destinasi di setiap kecamatan 2. Peningkatan pengembangan kerjasama pemasaran dan kemitraan pariwisata
	Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata		

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan pendukung adalah kegiatan yang bersifat operasional dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi perangkat daerah. Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang melaksanakan fungsi urusan pilihan pariwisata. Berikut penjabaran program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2016 dan setelah pemutakhiran sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No. 050 Tahun 2020.

#### 6.1. Program dan Kegiatan sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2016

PROGRAM	KEGIATAN
Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Penyediaan jasa administrasi keuangan
	Penyediaan jasa kebersihan kantor
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
	Penyediaan alat tulis kantor
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	Penyediaan peralatan rumah tangga
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	Penyediaan makanan dan minuman
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
	Pemasangan baru/ penambahan daya listrik
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan mebeleur
	Pemeliharaan rutin berkala/ gedung kantor
	Pemeliharaan rutin berkala/ kendaraan dinas/opersional
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal



Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
	Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)
	Penyusunan RENSTRA
	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan OPD
Program Pengembangan pemasaran pariwisata	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
	Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri
Program Pengembangan Destinasi pariwisata	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
	Pembangunan gapura identitas
	Pembangunan kios cinderamata
	Pembangunan plaza pusat jajanan kuliner
	Pembuatan jalur pejalan kaki
Program Pengembangan kemitraan	Pengembangan dan penguatan informasi dan database
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan
	Fasilitasi Sadar Wisata dan Kampanye Sapta Pesona Terhadap Masyarakat Sekitar Daerah Wisata
	Pendataan arus kunjungan wisatawan
	Sosialisasi Tentang Tata Cara Pendaftaran Izin Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga
	Penyusunan Standar Kelayakan Usaha Jasa Kepariwisataaan
	Pelatihan Tata kelola destinasi pariwisata
Program Peningkatan Kepariwisataaan	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
	Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
	Pelatihan Tata kelola Destinasi Wisata
	Pelatihan Manajemen Homestay/ Pondok Wisata/ Rumah Wisata
	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Pangkalpinang
	Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Kawasan Objek dan Daya Tarik Wisata
	Pembuatan pergola
	Penataan Lansekap
	Pembuatan ruang ganti dan/ atau toilet
Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
	Pelatihan dan pelaksanaan paskibraka
	Pengiriman duta belia paskibraka
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
	Pengembangan olahraga rekreasi
	Penyediaan Jasa Penunjang Sarana dan Prasarana Olahraga
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Program Peningkatan Kepemudaan dan Olahraga	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
	Pelatihan dan pelaksanaan paskibraka
	Festival Olahraga Tradisional (FOT)
	Pengembangan olahraga rekreasi
	Penyediaan Jasa Penunjang Sarana dan Prasarana Olahraga

6.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan setelah pemutakhiran Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No. 050 Tahun 2020

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Kegiatan Administrasi	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata

		Kabupaten/Kota
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri
		Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pemberian Insentif
		Fasilitasi Kekayaan Intelektual
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi

		Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha

Secara rinci rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tercantum pada tabel berikut :

Tabel 6.2  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Bidang Urusan Pemerintahan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2020	2021		2022		2023				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan potensi pariwisata							PAD sektor pariwisata		Rp.	14.036.203.600	15.439.823.960		16.983.806.356		18.682.186.991		18.682.186.991		Dispar
	Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata						Jumlah kunjungan wisatawan		Orang	133,648	147,012		161,713		177,884		177,884		Dispar
							Rata-rata lama tinggal wisatawan		Hari	1,5	1,5		1,5		1,5		1,5		Dispar
		Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan sarana pariwisata melalui pembangunan Infrastruktur, SDM,	Peningkatan pengembangan kerjasama pemasaran dan kemitraan pariwisata																
		pengembangan promosi, kemitraan pariwisata	Peningkatan Pengembangan Desa Wisata di beberapa kecamatan																
				Pilihan Pariwisata	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu DIBAGI jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan DIKALI 100	%	100	100	2.924.357.275	100	3.296.247.000	100	3.378.368.000	100	9.598.972.275	Dinas Pariwisata
					01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja disusun tepat waktu DIBAGI Jumlah dokumen Perencanaan,	%	100	100	6.680.000	100	48.000.000	100	50.000.000	100	104.680.000	Dinas Pariwisata
					01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja		Dokumen				3	10.000.000	2	10.000.000	5	20.000.000	
					01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD		Dokumen		1	2.520.000	1	8.000.000	1	10.000.000	3	20.520.000	
					01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD dn LKPJ Akhir Masa Jabatan		Dokumen				2	15.000.000	3	15.000.000	5	30.000.000	
					01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPIP, LAKIP dan RB		Dokumen		3	4.160.000	3	15.000.000	3	15.000.000	9	34.160.000	
					01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Jumlah layanan administrasi Keuangan yang tertangani DIBAGI jumlah layanan administrasi Keuangan yang dianggarkan DIKALI 100	%	100	100	2.917.677.275	100	3.248.247.000	100	3.328.368.000	100	9.494.292.275	Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Bidang Urusan Pemerintahan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Tahun 2020	2021		2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan		Orang		34	2.913.247.275	34	3.238.247.000	34	3.318.368.000	102	9.469.862.275	
					01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD		Laporan		1	2.190.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	12.190.000	
					01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD		Laporan		1	2.240.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	12.240.000	
							Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya DIBAGI jumlah aparatur yang harus ditingkatkan kapasitasnya DIKALI 100	%	100	100	25.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	245.000.000	Dinas Pariwisata
					01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang tertangani DIBAGI jumlah layanan administrasi Kepegawaian yang dianggarkan DIKALI 100	%	100	100	25.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	245.000.000	Dinas Pariwisata
					01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang diadakan		Stel				65	60.000.000	65	60.000.000	130	120.000.000	
					01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi		Orang		6	25.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	18	125.000.000	
							Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan DIBAGI layanan administrasi perkantoran yang dibutuhkan DIKALI 100	%	100	100	96.927.000	100	338.427.000	100	474.427.000	100	909.781.000	Dinas Pariwisata
					01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi Umum yang tertangani DIBAGI jumlah layanan administrasi Umum yang dianggarkan DIKALI 100	%	100	100	96.927.000	100	338.427.000	100	474.427.000	100	909.781.000	Dinas Pariwisata
					01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		Jenis		1	4.000.000	1	5.000.000	1	7.500.000	3	16.500.000	
					01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		Unit/set				19	103.000.000	16	134.000.000	35	237.000.000	
					01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan		Unit/set				1	7.500.000	1	60.000.000	2	67.500.000	
					01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia		Jenis		1	26.785.000	1	26.785.000	1	26.785.000	3	80.355.000	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Bidang Urusan Pemerintahan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2020	2021		2022		2023				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		Jenis		2	16.142.000	2	16.142.000	2	16.142.000	6	48.426.000	
					01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan		Kali		30	50.000.000	30	180.000.000	30	230.000.000	90	460.000.000	
							Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik DIBAGI dengan jumlah sarana dan	%	100	100	539.433.008	100	833.573.000	100	845.573.000	100	2.218.579.008	Dinas Pariwisata
					01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur yang tersedia DIBAGI dengan jumlah sarana dan prasana yang dibutuhkan DIKALI 100	%	100	100	-	100	50.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	Dinas Pariwisata
					01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang diadakan		Unit/set				45	50.000.000	45	50.000.000	90	100.000.000	
					01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhi Penyediaan Jasa	Jumlah layanan Jasa terpenuhi DIBAGI jumlah layanan Jasa yang dibutuhkan DIKALI 100	%	100	100	414.498.008	100	500.000.000	100	510.573.000	100	1.425.071.008	Dinas Pariwisata
					01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa yang tersedia		Jenis		3	117.483.228	3	170.000.000	3	180.573.000	9	468.056.228	
					01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki		Unit/set		61	29.271.000	61	30.000.000	61	30.000.000	183	89.271.000	
					01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani		Orang		63	267.743.780	63	300.000.000	63	300.000.000	189	867.743.780	
					01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam kondisi baik DIBAGI jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah DIKALI 100	%	100	100	124.935.000	100	283.573.000	100	285.000.000	100	693.508.000	Dinas Pariwisata
					01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara		Unit		2	81.585.000	2	83.573.000	2	85.000.000	6	250.158.000	
					01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara		Unit		1	43.350.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	443.350.000	
					3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	9,86	10	1.189.235.136	10	5.035.000.000	10	5.175.000.000	10	11.399.235.136	Dinas Pariwisata
							(8,9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	4,10	5,2		5,35		5,5		5,5		



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Bidang Urusan Pemerintahan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Tahun 2020	2021		2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					3.26.02.2. 01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Kegiatan	N/A	0	-	1	20.000.000	1	25.000.000	2	45.000.000	Dinas Pariwisata
					3.26.02.2. 01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumah entitas pengelolaan destinasi		daya tarik wisata				20	20.000.000	25	25.000.000	45	45.000.000	
					3.26.02.2. 02	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Kawasan	N/A	1	58.640.000	1	75.000.000	0	-	1	133.640.000	Dinas Pariwisata
					3.26.02.2. 02.01	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengembangan pariwisata		Dokumen		1	58.640.000	1	65.000.000	0	-	2	123.640.000	
					3.26.02.2. 02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang dimonitoring dan di evaluasi		Kawasan		0	-	1	10.000.000	0	-	1	10.000.000	
					3.26.02.2. 03	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan destinasi pariwisata		destinasi	1	1	1.130.595.136	1	4.920.000.000	1	5.125.000.000	1	11.175.595.136	Dinas Pariwisata
					3.26.02.2. 03.04	Pengadaan/Pemeli haraan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		destinasi		1	514.467.996	1	4.905.000.000	1	5.105.000.000	3	10.524.467.996	
					3.26.02.2. 03.06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/sosialisasi/ lomba		Orang		200	616.127.140	10	15.000.000	10	20.000.000	220	651.127.140	
					3.26.02.2. 04	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota		Industri Pariwisata	N/A	0	-	13	20.000.000	13	25.000.000	26	45.000.000	Dinas Pariwisata
					3.26.02.2. 04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah industri usaha pariwisata yang mendapat pembinaan dan pengawasan		Industri Pariwisata				13	20.000.000	13	25.000.000	26	45.000.000	
					3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n-1) dibagi jumlah wisatawan tahun n-1 dikali 100%	%	-57,69	10	1.252.420.000	10	1.250.000.000	10	1.832.300.000	30	4.334.720.000	Dinas Pariwisata
							Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual dibagi jumlah kamar yang tersedia dikali 100%	%	29,95	50		50		50		50		
							(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara	orang	283	312		343		377		377		
							(8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah wisatawan nusantara	orang	133,365	146700		161370		177507		177507		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Bidang Urusan Pemerintahan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Tahun 2020	2021		2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					3.26.03.2.01	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Kali	0	3	1.252.420.000	5	1.250.000.000	5	1.832.300.000	13	4.334.720.000	Dinas Pariwisata
					3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah jenis media promosi		Jenis		4	194.340.000	4	635.000.000	4	700.000.000	12	1.529.340.000	
					3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		Event		2	963.300.000	3	200.000.000	3	662.300.000	8	1.825.600.000	
					3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen pengembangan pariwisata		Dokumen		1	94.780.000	1	30.000.000	1	35.000.000	3	159.780.000	
					3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri		Industri pariwisata		-	-	25	350.000.000	25	400.000.000	50	750.000.000	
					3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata		Kali		-	-	2	35.000.000	2	35.000.000	4	70.000.000	
					3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif	Jumlah komunitas ekraf yang dibina dibagi jumlah komunitas ekraf secara keseluruhan dikali 100%	%	N/A	35	-	35	390.000.000	30	519.700.000	100	909.700.000	Dinas Pariwisata
					3.26.04.2.02	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif		Kali	0	0	-	3	390.000.000	3	519.700.000	6	909.700.000	Dinas Pariwisata
					3.26.04.02.02.06	Pemberian Insentif	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		Lokasi		0	-	10	160.000.000	10	280.000.000	20	440.000.000	
					3.26.04.02.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan		orang		0	-	100	153.300.000	100	160.000.000	200	313.300.000	
					3.26.04.02.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Kali		0	-	12	76.700.000	12	79.700.000	24	156.400.000	
					3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	Jumlah pelaku ekraf yang dibina dibagi jumlah pelaku ekraf secara keseluruhan dikali 100%	%	N/A	30	364.340.856	35	160.000.000	35	290.000.000	100	814.340.856	Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Bidang Urusan Pemerintahan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2020	2021		2022		2023				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							(8.9.2*)Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja		%	9,84	10,72		11,59		12,47		12,47		
					3.26.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar		Kali	N/A	3	241.115.428	2	100.000.000	2	220.000.000	7	561.115.428	Dinas Pariwisata
					3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		Lokasi		7	35.300.000	1	50.000.000	1	70.000.000	9	155.300.000	
					3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan		Orang		60	151.225.428	20	50.000.000	20	150.000.000	100	351.225.428	
					3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen pengembangan pariwisataa		Dokumen		1	54.590.000	0	-	0	-	1	54.590.000	
					3.26.05.2.02	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif		Kali	N/A	0	123.225.428	1	60.000.000	1	70.000.000	2	253.225.428	Dinas Pariwisata
					3.26.05.2.02.02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan		Orang		40	123.225.428	40	60.000.000	40	70.000.000	120	253.225.428	
								TOTAL				6.391.713.275		11.413.247.000		12.625.368.000		30.430.328.275	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

**Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2018-2023**

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Dinas Pariwisata yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Tahun 2018 - 2023

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun		Target Akhir RPJMD
				2019	2020	
1	PDRB Perkapita	Juta perkapita		64.42	61.50	65.26
2	LPE sektor pariwisata	%		2.73	-5	2
3	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	228.473	315.888	133.648	133.648
4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	6,69	10	10	10
5	Tingkat hunian akomodasi	%	N/A	5	5	5
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1,64	2,1	2,1	2,1
7	Rasio prestasi pemuda di tingkat propinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	%	93,12	94	95	95
8	Rasio prestasi olahraga di tingkat propinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	%	89,56	91	92	92

Tabel 7.2  
Indikator Kinerja Dinas Pariwisata yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018 - 2023

NO	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun			Target Akhir RPJMD
						2021	2022	2023	
1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah		PDRB Perkapita	Juta perkapita	61.50	62.42	63.67	65.26	65.26
2	Meningkatnya Penggalian,Pemanf ataan,dan Pengembangan potensi sektor pariwisata daerah		PAD sektor pariwisata	Rp.	16.500.000. 000	18.150.000 .000	19.965.000 .000	21.961.500 .000	21.961.500 .000
3	Meningkatkan potensi pariwisata		PAD sektor pariwisata	Rp.	16.500.000. 000	18.150.000 .000	19.965.000 .000	21.961.500 .000	21.961.500 .000
4	Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata		Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	133.648	147.012	161.713	177.884	177.884
5			Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100

7		Terwujudnya ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	%	100	100	100	100	100
8		Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran perangkat daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100
9		Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100
10	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	%	100	100	100	100	100
11	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya adminisrasi keuangan perangkat daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	%	100	100	100	100	100

12	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	%	100	100	100	100	100
13	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi Umum	%	100	100	100	100	100
14	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	100	100	100	100
15	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa	%	100	100	100	100	100
16	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	100	100	100	100
17	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Tercapainya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	9,86	10	10	10	10



18		Tercapainya kontribusi pariwisata terhadap PDRB	(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang)	%	4,10	5,20	5,35	5,50	5,50
19	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	1	1	2
20	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kawasan	1	1	1	0	1
21	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan destinasi pariwisata	Destinasi	1	1	1	1	1
22	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Industri Pariwisata	0	0	13	13	26
23	Program Pemasaran Pariwisata	Tercapainya tingkat kunjungan wisatawan	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	10	10	10	10	30

24		Tercapainya tingkat hunian akomodasi	Tingkat hunian akomodasi	%	5	5	5	5	15
25		Tercapainya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara	Orang	283	312	343	377	377
26		Tercapainya jumlah kunjungan wisatawan nusantara	(8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	133365	146700	161370	177507	177507
27	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kali	3	3	5	5	13
28	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif	%	N/A	35	35	30	100

29	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Kali	N/A	0	3	3	6
30	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	%	N/A	30	35	35	100
31		Tercapainya jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	(8.9.2*)Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	%	9,84	10,72	11,59	12,47	12,47
32	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terwujudnya pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Kali	N/A	3	2	2	7
33	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Jumlah pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Kali	N/A	0	1	1	2

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1. Pedoman Transisi**

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2018–2023 adalah sejak dikeluarkannya dokumen revisi ini sampai dengan tahun 2023. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Perubahan Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

#### **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.